

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI KECAMATAN  
TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI**

**TESIS**

**Oleh**

**IRMA SURYANI  
161801075**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

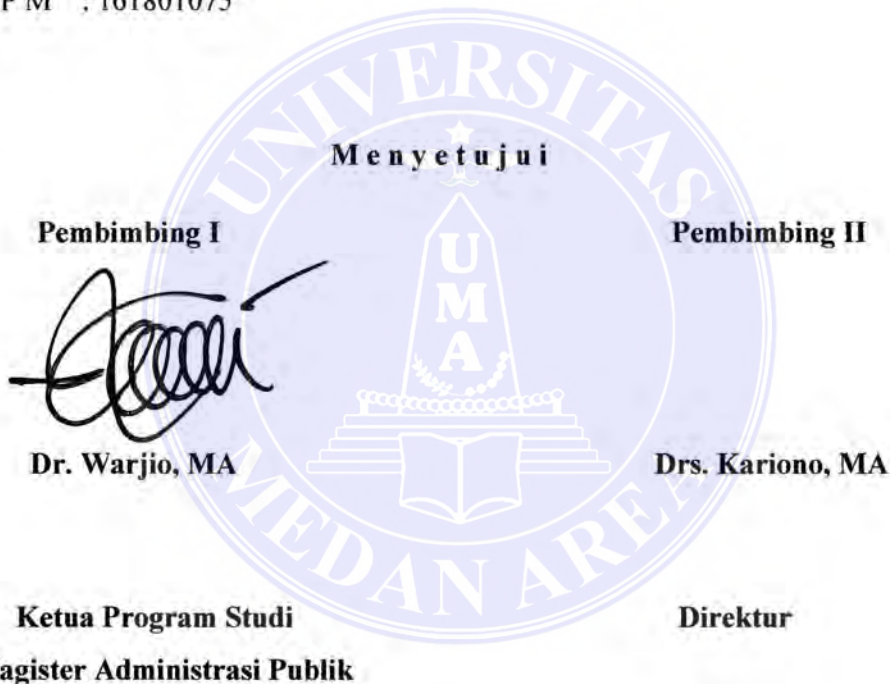
**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Usaha  
Ekonomi Produktif di Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai**

**N a m a : Irma Suryani**

**N P M : 161801075**



**Dr. Warjio, MA**

**Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS**

## ABSTRAK

### Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Nama : IRMA SURYANI  
NPM : 161801075  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Pembimbing I : Dr. Warjio, MS  
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

**Abstrak:** Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju. Adapun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai sendiri telah berupaya untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi lemah. Program yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi khususnya pada sub bidang Pemberdayaan masyarakat kelurahan, beserta dampak program pemberdayaan tersebut terhadap kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan. Dampak dari program pemberdayaan yang dilaksanakan telah dapat

meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan peranannya sebagai koordinator dan fasilitator, seharusnya senantiasa bekerja secara optimal dan profesional dengan memperhatikan tupoksi, target dan melaksanakan target tersebut secara konsisten, serta meningkatkan interaksi antara masyarakat yang memperoleh bantuan hibah meningkatkan intensitas dalam menjalankan monitoring kepada masyarakat yang telah mendapatkan bantuan.

*Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, dan bidang usaha ekonomi*



## ABSTRACT

*Evaluation of Community Empowerment Program in Productive Economic Sector in Teluk Nibung Sub District of Tanjungbalai City. This research based on Women Empowerment Department, Child Protection and Community Empowerment of Urban Village of Tanjungbalai City has highly influent to change thinking up at more progress.*

*Women Empowerment Department, Child Protection and Community Empowerment of Urban Village of Tanjungbalai City has sought to empowering poor society by providing assistance to low-income communities. Programs that have been implemented in the field of economic enterprises especially in the sub-field of Community Empowerment of Urban Village, along with the impact of the empowerment program for the poor economic independence are expected to improve the welfare of the community.*

*This research use description method with qualitative approach. The result of this research shows that programs have been implemented by Women Empowerment Department, Child Protection and Community Empowerment of Urban Village of Tanjungbalai City especially on Economic Sector include individual assistance and association assistance. So, that was need a good work between the society and government.*

*The program has increased the economical ability, especially in productivity and percapita income. The recommendation give from this research are Women Empowerment Department, Child Protection and Community Empowerment of Urban Village of Tanjungbalai City should work optimally and professionally as a coordinator and facilitator for the society to have a better life. They should pay a lot of attention in target, and do it constantly. Increase the interaction with society, giving more intensity to monitoring them.*

*Keyword: society empowerment, and economic sector*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. PerumusanMasalah.....	7
1.3. TujuanPenelitian.....	9
1.4. ManfaatPenelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Teori-teori Pendukung.....	11
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Pemikiran.....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
3.3. Bentuk Penelitian.....	28
3.4. Populasi dan Sampel.....	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6. Teknik Analisis Data.....	41
3.7. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional.....	42
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran umum kecamatan Teluk Nibung.....	45
4.2 Pembahasan.....	54

## V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Implikasi Kebijakan.....	73

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Secara umum pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Namun angka kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. Kemiskinan di sini dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya. Adapun tujuan dari bidang usaha ekonomi produktif pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah pemberian bantuan stimulan untuk menunjang masyarakat yang kurang beruntung, guna peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, baik itu berupa kerajinan tangan maupun olahan pangan yang bersumber dari bahan dasar lokal.

Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat Kota Tanjungbalai pada dasarnya harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada. Dengan memberikan kewenangan dan kekuatan kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia secara



optimal, sehingga mereka diharapkan dapat berdaya dalam memperbaiki kemampuan ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Pemberdayaan ekonomi rakyat di sini merupakan upaya dalam mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian. Dalam hal ini, konsep dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Tanjungbalai khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya.

Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera mengingat besarnya potensi sumber daya alam pesisir dan laut. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir, terutama nelayan masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal. Hal ini sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat berlimpah, tetapi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan hidup dalam kemiskinan.

Masyarakat yang berada di kawasan pesisir menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan kemiskinan. Pada umumnya mereka menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar dan sangat bergantung musim. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil

hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai.

Pengalaman bangsa Indonesia di masa lalu dalam membangun wilayah pesisir dan lautan menunjukkan hasil yang kurang optimal dan cenderung menuju kearah yang tidak berkelanjutan. Masyarakat nelayan sebagai komunitas wilayah pesisir sering kali tersisih dari pembangunan, sebab prioritas kebijakan pemerintah lebih terfokus kepada sektor pertanian atau daratan. Kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional. Disamping alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal, mereka melaut juga pada area penangkapan yang terbatas di wilayah pesisir. Rendahnya daya jelajah nelayan ini, semakin menambah sulit nelayan memperbaiki kualitas hidupnya. Dibandingkan nelayan di negara tetangga seperti Malaysia, Jepang dan lainnya, nelayan Indonesia umumnya memanfaatkan hasil laut hanya untuk bertahan hidup.

Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir di kecamatan Teluk Nibung merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Kondisi masyarakat pesisir diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia

(SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau tidak tamat sekolah dasar.

Menurut Kusnadi (Direktorat PMP, 2006), bahwa sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan nelayan adalah : Pertama, belum adanya kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terpadu diantara para pemangku kepentingan pembangunan. Kedua, adanya inkonsistensi kuantitas produksi (hasil tangkapan), sehingga keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan terganggu. Ketiga, masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar masuk arus barang, jasa, capital, dan manusia, yang mengganggu mobilitas ekonomi. Keempat, adanya keterbatasan modal usaha atau modal investasi, sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya. Kelima, adanya relasi sosial ekonomi yang “eksploitatif” dengan pemilik perahu, pedagang perantara/tengkulak dalam kehidupan masyarakat nelayan. Keenam, adalah rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, sehingga berdampak negatif terhadap upaya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas kehidupan mereka.

Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan yang berdampak negatif terhadap peningkatan skala usaha perbaikan kualitas kehidupan keluarga ini yang akan menjadi fokus penelitian. Istri, anak ( anggota keluarga ) dan bahkan kepala keluarga yang bekerja sebagai nelayan harus mampu memberdayakan diri untuk menggali potensi yang mereka miliki dalam menciptakan suatu produk yang dapat dijual atau dipasarkan untuk menambah

pendapatan ekonomi keluarga. Jadi, tidak semata-mata tergantung dengan hasil penangkapan ikan dilaut.

Upaya peningkatan pendapatan keluarga di kecamatan Teluk Nibung tidak jauh dari pemanfaatan hasil laut dan limbah laut, seperti aneka olahan ikan dan aneka kerajinan kulit kerang. Upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Teluk Nibung.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat bernisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Di sisi lain, salah satu kata kunci pada saat ini yang sering didengungkan oleh semua lapisan masyarakat adalah kata peningkatan sumberdaya manusia. Kata tersebut mempunyai makna lebih spesifik lagi menyangkut bagaimana mengangkat kondisi masyarakat yang ada menjadi lebih baik dimasa mendatang. Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) maka kita langsung bertanya, bodohkah kami, Jelekah kami, Apa kekurangan kami, atau apa yang harus kami perbaiki. Jawabannya adalah kita berdayakan sesuatu yang kita miliki yaitu yang sering disebut potensi

Badaruddin (2005:25) mengemukakan, pemberdayaan merupakan gerakan cultural (budaya) melalui penyadaran akan kesejahteraannya. Selanjutnya Stewart menjelaskan "individu bukanlah objek, melainkan berperan sebagai pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya, dan mengarahkan proses yang

mempengaruhi hidupnya”. Pemerintah memandang dengan potensi wilayah pesisir yang besar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu adanya upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kesasarannya. Salah satu program yang bertujuan dan mendukung kearah tersebut adalah program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi produktif berupa kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2WKSS).

. Program ini sangat mendukung perekonomian keluarga. Pekerjaan masyarakat tidak hanya sebatas nelayan, tetapi juga dapat memiliki usaha sampingan yang mendukung peningkatan pendapatan keluarga, misalnya masyarakat dilatih untuk mengolah ikan hasil tangkapan menjadi aneka panganan berbahan dasar ikan, seperti abon ikan, nugget ikan, bakso ikan, kerupuk ikan, dll. Selain itu masyarakat di kecamatan Teluk Nibung juga memanfaatkan limbah kulit kerang menjadi aneka kerajinan tangan, seperti bunga hias, kotak tissue, souvenir pernikahan, lampu hias, dll

Namun keberhasilan program yang dilaksanakan masih menjadi tanda tanya, untuk itu sangat perlu dilakukan studi evaluasi kinerja terhadap program sehingga efisiensi, efektifitas, pencapaian sasaran, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dapat teridentifikasi guna memperbaiki program selanjutnya. Makna penelitian ini menjadi sangat penting mengingat bahwa salah satu kelemahan dalam pelaksanaan program pada umumnya adalah kurangnya

kemampuan menilai hasil kerja. Kaitan antara penelitian ini adalah bahwa selama ini program pemberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan masih belum dilakukan evaluasi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menilai sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program yang telah berjalan.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan hasil, manfaat dan dampak pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat, dan untuk mengetahui pencapaian sasaran dan tujuan, sebab, keberhasilan atau kegagalannya, serta berbagai jenis manfaat yang ditimbulkannya. Selanjutnya dengan mengetahui kekurangan, ketidakberhasilan dapat sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kembali kebijakan (reformulation) atau penyesuaian (adjustment) yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan judul penelitian sebagai berikut :

“EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI.”

## 1.2. Perumusan Masalah

### 1.2.1. Identifikasi Masalah

Memperhatikan uraian diatas, maka masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya evaluasi dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kota Tanjungbalai.

2. Minimnya penghasilan keluarga jika hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan laut atau hanya bekerja sebagai nelayan.
3. Kurangnya kemandirian masyarakat dalam berusaha yang terkesan harus dilakukan pendampingan secara terus menerus.

### 1.2.2. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup masalah yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi produktif yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kota Tanjungbalai bagi masyarakat kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai.

### 1.2.3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja kegiatan dalam program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi produktif pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kota Tanjungbalai?

2. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi produktif pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kota Tanjungbalai?
3. Apakah dampak dari program pemberdayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian masyarakat?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja kegiatan dalam program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi produktif pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kota Tanjungbalai?
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kota Tanjungbalai.
3. Untuk mengetahui apa dan seberapa besar dampak program pemberdayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi atas :

1. Bidang kajian ilmiah, yaitu memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian ilmiah yang akan dilakukan di masa depan dan memperkaya



wawasan dalam pengembangan ilmu, khususnya mengenai pengaruh pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendukung program pemberdayaan masyarakat dan menggali potensi diri serta memberdayakan diri dalam meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga.
3. Memberikan informasi kepada pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kota Tanjungbalai bagaimana agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang merupakan target/sasaran program.
4. Bagi para peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat.

## BAB II

### PENDEKATAN MASALAH

#### 2.1. Teori-Teori Pendukung

##### 2.1.1. Tinjauan tentang Evaluasi

###### 1. Definisi Evaluasi

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:272) evaluasi berarti penilaian Sedangkan menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah :  
“ Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”.

Menurut buku Metode Riset Evaluasi, Hadi (2011:13) mendefinisikan evaluasi sebagai “proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”.

Pendapat selanjutnya muncul dari Husni (2010: 971), yang menyatakan bahwa “evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan”. Sedangkan menurut Arikunto (2010:1). “Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Sejalan dengan definisi evaluasi menurut Wirawan dan Hadi, secara sederhana menurut peneliti evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah tahapan

penilaian yang ditujukan kepada objek evaluasi, untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dideskripsikan dalam bentuk informasi. Dalam penelitian ini objek yang akan dievaluasi adalah program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, khususnya masyarakat pesisir di wilayah kecamatan Teluk Nibung, yang dalam proses evaluasinya akan melihat pelaksanaan program dan hasil yang akan dideskripsikan dari evaluasi ini ialah informasi mengenai pelaksanaan program yang terlaksana dengan baik dan tidak terlaksana dengan baik.

## 2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan manadimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur cost effectifenis dan cost efficiency.
9. Mengambil keputusan mengenai program.
10. Akuntabilias.

11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan program.

12. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

### 3. Jenis - Jenis Evaluasi

Wirawan (2012: 16-18) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis yaitu :

#### a. Evaluasi Kebijakan

“Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya”.

Istilah lainnya ialah analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.”

#### b. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja di lakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat ”.

### c. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program; “Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation)”. Program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan jenis evaluasi yang ada maka masuk dalam jenis evaluasi program dan akan dievaluasi dengan tahapan evaluasi program yang sesuai.

Berdasarkan jenis evaluasi menurut Wirawan, maka terkait dengan konteks penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengevaluasi program, yang dalam hal ini adalah program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi produktif. Tujuan evaluasi program ini ialah, mengukur apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan standar, serta dapat mengidentifikasi dan menentukan mana dimensi program yang berjalan, mana yang tidak berjalan serta unsur mana yang perlu dan harus untuk ditindaklanjuti.

Evaluasi program adalah langkah awal pengumpulan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian tindak lanjut yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi para pengambil keputusan, sedangkan evaluator adalah orang yang melakukan evaluasi. Banyak ragam atau jenis evaluasi yang dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan

evaluasi program. Hamalik (2003:212) mengemukakan bahwa model atau jenis evaluasi program tersebut adalah :

a. Evaluasi perencanaan dan pengembangan.

Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan kepada penyusun program dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka mendesain suatu program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk meramalkan implementasi program dan kemungkinan tercapai tidaknya program di kemudian hari.

b. Evaluasi monitoring

Evaluasi monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah program mencapai sasaran efektif. Apakah hal-hal dan kegiatan yang telah didesain secara spesifik terlaksana sebagaimana mestinya. Kenyataan tidak jarang program justru tidak mencapai sasaran, karena apa yang telah didesain dalam program tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti pengadaan personil, fasilitas, perlengkapan, biaya, dan faktor-faktor penyebab lainnya.

c. Evaluasi dampak

Evaluasi dampak bertujuan menilai seberapa jauh program dapat memberikan pengaruh tertentu pada sasaran yang telah ditetapkan, apakah program berdampak positif atau justru sebaliknya. Dampak tersebut diukur berdasarkan kriteria-kriteria keberhasilan, sehingga program tersebut perlu di spesifikasi agar dapat diamati dan diukur setelah program itu dilaksanakan.

d. Evaluasi efisiensi

Evaluasi efisiensi dimaksud untuk menilai berapa besar tingkat efisiensi suatu program. Apakah program mampu memberikan keuntungan memadai ditinjau dari segi biaya yang dikeluarkan, tenaga yang digunakan dan waktu yang terpakai.

e. Evaluasi program komprehensif

Evaluasi program komprehensif yaitu dampak menyeluruh terhadap program yang meliputi; implementasi program, dampak atau pengaruh setelah program dilaksanakan dan tingkat efisiensi program dalam program itu. Selanjutnya Wirawan (2012:17) mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 (tiga) bagian yang berbeda yaitu:

1. Evaluasi Proses (process evaluation) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani.
2. Evaluasi manfaat (outcome evaluation) meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.
3. Evaluasi akibat (impact evaluation) dimana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut. Dalam penelitian ini peneliti lebih spesifik menyajikan informasi pada kelompok bagian dari evaluasi proses (process evaluation).

### 2.1.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan”, di mana “daya” bermakna kekuatan (*power*). Bryant & white (1997) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.

Usman (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) dapat didefinisikan sebagai “upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat”. Dalam konteks ini, secara implisit pemberdayaan mengandung unsur “partisipasi” yang seharusnya dimunculkan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam hal ini Pearse dan Stiefel (1979) membedakan istilah “pemberdayaan partisipatif” yang mengandung bentuk-bentuk seperti: menghormati kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuasaan, dan peningkatan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dari memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut



belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (Suharto 2005).

Shardlow (1998) menyatakan bahwa pemberdayaan akan dikatakan berhasil jika masyarakat atau kelompok mengalami keadaan yang berdaya atau mengalami keberdayaan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk menopang kebutuhannya sendiri. Individu, atau komunitas yang mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan kesejahteraan hidupnya, maka inilah yang disebut keberdayaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan, ketidakmampuan, dan musibah yang melanda.

Ratna Devi (2006) Pemberdayaan dalam Bahasa Inggris adalah empowerment. Kata power dalam empowerment diartikan "daya" sehingga empowerment diartikan sebagai pemberdayaan atau memberikan daya. Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi cukup dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Pemberdayaan pada dasarnya memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar pengembangan diri.

Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tapi juga kolektif (Harry Hikmat, 2001: 46-48).

Pemberdayaan membangun hubungan kekuatan dan kemampuan individu dengan sistem bantuan yang alami, dan perilaku proaktif menuju kebijakan sosial dan perubahan sosial. Pemberdayaan berorientasi pada intervensi peningkatan yang baik, selama mereka juga memiliki tujuan untuk memperbaiki masalah, menyediakan kesempatan untuk anggotanya atau individu untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, serta melibatkan para profesional yang berkolaborasi atau bekerjasama sebagai pengganti tenaga ahli. Pemberdayaan tak lepas dari peran serta pihak luar kelompok sebagai pendukung dan fasilitator dalam memperoleh kekuatan atau keberdayaan kembali.

Menurut Tjandraningsih (1996:3), pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan menurut Drajat Trikartono (2000) adalah membuat menjadi punya power atau daya untuk melakukan sesuatu. Margono Slamet (dalam Totok Mardikanto, (2001) menegaskan bahwa memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Menurut Kartasmita (1995) dalam (Vidhyandika Moeljarto, 1996) "Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya". Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan memiliki unsur-unsur, yaitu adanya upaya memberi daya/kekuatan dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (Ratna Devi, 2006).

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Ada beberapa upaya dalam pemberdayaan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :

1. Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
2. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi kelompok berarti berupaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang (Warta Demografi, 1997). Selanjutnya harus menggunakan pendekatan kelompok dan partisipasi kelompok karena secara sendiri-sendiri warga masyarakat yang kurang berdaya sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Organisasi adalah salah satu sumber power yang penting, maka untuk empowerment, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting sekali.

Menurut Girvan (2006), pemberdayaan dilihat dari tujuan yang ingin didapatkan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin atau lemah yang menjadi berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai atau membangkitkan atau mempertahankan mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok (pelatihan, kursus, pertemuan rutin, dan lain-lain), dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

Tri Widodo W. Utomo (2003) dalam "Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan" menjabarkan kategorisasi pemberdayaan menjadi 5 (lima) kelompok besar pemberdayaan. Penelitian ini mengacu pada 3 kategori pemberdayaan, yakni:

1. Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya seperti modal, informasi, kesempatan berusaha dan memperoleh kemudahan / fasilitas. Aktifitas didalamnya antara lain; pemberian pinjaman lunak, penerbitan dan penyebaran bulletin/pamflet, subsidi bagi pengusaha lemah dan sebagainya.
2. Pengembangan potensi masyarakat baik dalam pengertian SDM maupun kelembagaan masyarakat. Setiap upaya untuk merubah kondisi dari bodoh menjadi pintar, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tuna keterampilan menjadi terampil, dan sebagainya, jelas sekali

merupakan program pemberdayaan. Aktivitas semacam pelatihan, penyuluhan dan kursus-kursus yang diselenggarakan secara sistematis dengan tujuan memperkuat potensi masyarakat, adalah contoh nyata dari aksi pemberdayaan.

3. Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan atau kelompok.

Seiring dengan paradigma pembangunan yang bertumpu dan berorientasi pada rakyat (*people-based and people-oriented development*), rakyat harus diakui dan ditempatkan sebagai elemen kunci dalam perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan atau kelompok. Kategori pemberdayaan yang lain adalah :

1. Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan.
2. Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan swakelola dalam bidang pelayanan umum atau infrastruktur umum. Hal ini terkait dengan pembangunan, khususnya di perkotaan.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat (Hikmat, 2001). Dari konsep pemberdayaan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dan lautan merupakan

pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Masyarakat harus mampu dan berani melakukan perubahan, yang selama ini hanya bekerja sebagai nelayan dengan tujuan hanya menangkap ikan dan menjual untuk menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, Menurut Soesilowati dalam Latif (1999), ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir yaitu :

1. Strategi fasilitatif yaitu strategi yang mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran suatu program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen perubah bersama-sama masyarakat mencari penyelesaian terhadap suatu masalah.
2. Edukatif, yaitu strategi yang memberikan pengetahuan dan keahlian pada masyarakat yang akan diberdayakan.
3. Strategi persuasif, yaitu strategi yang berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila masyarakat tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan.
4. Strategi kekuasaan, yaitu strategi yang membutuhkan agen perubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai akses untuk monopoli. Inti dari empat strategi pemberdayaan di atas adalah memberikan cara pengelolaan terbaik yang

harus dilakukan agar masyarakat pesisir mau dan mampu mengelola sumberdaya yang mereka miliki.

### 2.1.3. Tinjauan tentang Pendapatan

#### 1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya), sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: "Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat.



Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah”.

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi

rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

Dalam Kamus Ekonomi, pendapatan (income) adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan lain sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya (Christopher Pass dan Bryan Lowes, 1994:287.). Senada dengan definisi di atas, pendapatan atau income dari seseorang adalah hasil penjualannya dari faktor - faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi (Boediono, 1996:170).

Biro Pusat Statistik, Pendapatan faktor yang didistribusikan dapat dibagi menurut sumbernya menjadi :

- a. Penghasilan sebagai upah
- b. Penghasilan dari usaha sendiri dan pekerjaan
- c. Penghasilan dari kepemilikan harta.

Kemudian Biro Pusat Statistik membedakan pengertian pendapatan berupa uang dan barang. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

- a. Pendapatan berupa uang yaitu pendapatan dari gaji/upah yang diperoleh dari pekerja pokok, kerja lembur, kerja sampingan, dan kerja kadang - kadang.
- b. Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan yang berupa pengobatan, transportasi, perumahan, barang produksi dan konsumsi.

Secara umum pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang (atau lebih) anggota keluarga dari jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (A.G Pringgodigdo, 1982:817).

Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa pendapatan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dimana pendapatan merupakan ukuran yang dipakai untuk melihat apakah kehidupan seseorang itu layak atau tidak layak. Dengan pendapatan yang tinggi, setidaknya semua kebutuhan pokok terpenuhi sehingga dapat mencapai suatu tingkat kehidupan yang layak.

Para perintis ilmu ekonomi, membagi masyarakat atas tiga kategori, yaitu kaum pekerja (dan petani), para pengusaha atau kapitalis (kelas menengah) dan para tuan tanah (T. Bilarso, 1994:78). Menurut Valerie J. Hull yang dikutip oleh Masri Singarimbun, bahwa jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga termasuk barang dan hewan peliharaan dipakai untuk membagi keluarga ke dalam tiga kelompok pendapatan yaitu pendapatan tinggi, pendapatan menengah dan pendapatan rendah (Masri Singarimbun, 1985:24).

Golongan berpenghasilan rendah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan pokok (Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter-Evers,1982:80-81). Dilihat dari ekonomi dalam masyarakat terdiri dari tiga lapis yaitu:

1. Lapisan ekonomi mampu atau kaya, terdiri dari para pejabat, pemerintah setempat, para dokter, insinyur dan kelompok profesional lainnya.
2. Lapisan ekonomi menengah, yang terdiri dari alim ulama dan pegawai.
3. Lapisan ekonomi miskin, yang terdiri dari buruh, para petani, buruh bangunan, buruh pabrik, dan buruh-buruh sejenis yang tidak tetap.

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah mengkaji tentang evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dahlan Tampubolon Laboratorium Ekonomi Pembangunan Regional Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI menyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten baru mengalami Pertumbuhan penduduk usia produktif yang relatif tinggi, di mana penduduknya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sebagian besar bermukim di perdesaan dan wilayah pesisir. Masyarakat Menggantungkan hidupnya di sekitar sektor

perikanan. Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki minat dan Semangat berwirausaha yang oleh didorong dengan kebutuhan dan biaya hidup Yang semakin tinggi. Minat dan semangat berwirausaha ditunjukan dengan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Witorsa Di Universitas Tanjungpura, Indonesia dengan judul Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan Di Kabupaten Pontianak Menyatakan bahwa Prioritas program pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai dengan urutannya adalah sebagai berikut :
  - a. Pemberdayaan masyarakat berbasis perikanan tangkap pada wilayah yang sudah terjadi over fishing.
  - b. Pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya pada wilayah yang sumberdaya yang lahannya terbatas.
  - c. Pemberdayaan masyarakat pada wilayah yang terjadi degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan.
  - d. Pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi dan pariwisata bahari.
  - e. Pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis perikanan tangkap pada wilayah yang sumberdayanya masih melimpah.
  - f. Pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya pada wilayah yang sumberdayanya masih tinggi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh DIAS NILASARI Program Studi Ilmu Pemerintahan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017 dengan judul ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA WEWANGRIU KECAMATAN MALILIKABUPATEN LUWU TIMUR, menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun peran nyata pemerintah dapat terlihat dari :
- a. Pengembangan potensi perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil komoditi perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat di Desa Wewangriu.
  - b. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya penyadaran atas potensi masyarakat. Semua yang terlibat dalam pelatihan ini adalah pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial, dengan Pemerintah Desa Wewangriu Kecamatan Malili.
  - c. Bantuan Modal Usaha, Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang bekerja sama dengan Perusahaan PT. Vale memberikan bantuan modal

dengan dana bergulir dan dana Program TerpaduPemberdayaan Masyarakat (PTPM) yang diberikan kepadamasyarakat .

- d. Dukungan Sarana dan Prasarana, dilakukan dengan harapan dapatmenambah tingkat produksi/ hasil tangkap nelayan denganpembangunan beberapa prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan kondisi perekonomian masyarakat pesisir.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nendah Kurniasari dan Elly Reswati Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2011 dengan judul MEMAKNAI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR menyatakan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan proses pembelajaran yang cukup mahal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) sebagai sarana yang meneruskan upaya pemberdayaan ini hendaknya benar-benar mengambil pelajaran dari kekurangan-kekurangan PEMP agar tidak menjadi sebuah 'program pengentasan kemiskinan tanpa pemberdayaan'.

Upaya PNPM-KP untuk mengintegrasikan program pemberdayaan pada berbagai Direktorat Jenderal dalam satu wadah memang merupakan hal yang penting dilakukan, namun masih banyak lagi kekurangan-kekurangan program terdahulu yang mesti dpenuhi dalam program ini agar mencapai tujuan yang diinginkan. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah, seperti apapun konsep strategi yang diagendakan oleh suatu proses pemberdayaan tidak akan berhasil jika sektor kelautan dan perikanan tidak menjadi pertimbangan dalam strategi makro kebijaksanaan strategis nasional.

Dalam hal ini peran DPR sebagai pembuat dan perumus Undang-Undang perlu memiliki *political will* yang fokus kepada kepentingan dan keberlanjutan masyarakat pesisir. Dengan demikian, produk perundang-undangan yang dibuat tidak serta merta menjadikan masyarakat pesisir tercabut dari hak-haknya sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan warga dari komunitas yang lain.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Roslinawati dengan judul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) DI KABUPATEN DONGGALA menyatakan bahwa Persepsi masyarakat mengenai motivasi mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) adalah ingin memperoleh modal usaha dan membantu meningkatkan pendapatan rumahtangga. Selain itu, dapat dikemukakan bahwa peran Program PEMP adalah menyediakan modal usaha, memberdayakan/membantu masyarakat pesisir.

Manfaat yang diperoleh masyarakat melalui Program PEMP adalah meringankan beban ekonomi rumahtangga, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendapatkan bantuan modal usaha. Sehingga masyarakat menginginkan program tersebut berjalan terus.. Terdapat perbedaan pendapatan yang diperoleh masyarakat sebelum dan sesudah mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Artinya terjadinya kenaikan (perubahan positif) pendapatan yang diperoleh setelah mengikuti program PEMP.



6. Penelitian yang dilakukan oleh LUCKY ZAMZAMI jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas Padang 2011 dengan judul PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI NAGARI AMPIANG PERAK, SUMATERA BARAT menyatakan bahwa Program PEMP merupakan suatu program inovasi dalam usaha mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan buruh dengan 2kegiatan besar, yaitu bantuan mesin perahu dan peminjaman modal usaha. Namun dalam prosesnya ada beberapa prosedur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu verifikasi terhadap calon anggota di mana verifikasi yang digunakan tidak berdasarkan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam *Pedoman Umum PEMP*.

Dalam pelaksanaannya, program PEMP dianggap suatu program yang memberikan sanksi-sanksi yang jelas bagi anggota KMP yang menunggak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada anggota KMP yang menunggak menimbulkan dampak yang negatif, karena sanksi yang diberikan adalah penarikan bantuan beserta dengan jaminannya.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam program PEMP adalah tidak adanya monitoring dan evaluasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan nelayan buruh dan pelaksana program PEMP yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Akibat dari tidak adanya monev tersebut, maka pihak dinas tidak mengetahui masalah apa saja yang muncul dalam program PEMP

7. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidin, Hj. Mas'adz dengan judul ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) DI DUSUN TAMAN DESA TAMAN AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT menyatakan bahwa Implementasi PEMP di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Pelaksanaan kebijakan

PEMP dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Gerung terdiri dari empat tahap, antara lain yaitu tahap persiapan; tahap pelaksanaan; tahap pengendalian; dan tahap pelestarian. Pemanfaatan dana bantuan telah sesuai dengan tiga komponen kegiatan yang menjadi sasaran tujuan program PEMP, yaitu ekonomi produktif; pelatihan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan. Namun masih ada sejumlah anggota KSM yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk kegiatan konsumtif. Pembentukan BKM dan KSM dilaksanakan secara demokratis, transparansi, dan jujur, karena kedua lembaga lokal inilah yang berinteraksi dalam pelaksanaan PEMP.

Dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan PEMP dibagi menjadi dua, yaitu: Dampak positifnya antara lain a) Keuangan PEMP semakin hari semakin meningkat jumlahnya, b) Dapat memberi kesempatan luas bagi masyarakat/KSM lain yang membutuhkan dana lunak, c) Dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dampak negatifnya antara lain: a) Dapat menimbulkan

kecemburuan sosial, b) Kurang kreatif, karena mengharapkan pinjaman ke PEMP setiap membutuhkan dana.

Dalam pelaksanaan PEMP di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program PEMP di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, yaitu: a) Partisipasi masyarakat terhadap program, b) Kelembagaan masyarakat yang efektif, c) Kemudahan dalam memperoleh bantuan, d) Kesadaran masyarakat. Faktor penghambat pelaksanaan PEMP, yaitu: a) Dana yang tersedia hanya dalam jumlah terbatas, sehingga tidak mencakup seluruh warga Kecamatan yang menjadi sasaran program, b) Kurangnya koordinasi antara pengurus BKM/KSM dengan anggotanya sehingga program tidak berjalan optimal, c) Pemahaman mengenai konsep.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kota Tanjungbalai, ingin mengetahui seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat, dalam hal ini masyarakat kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai.

Tiga dimensi yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- a. enabling yaitu terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat
- b. empowering yaitu potensi yang dimiliki oleh masyarakat
- c. protecting yaitu potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat

Dimensi enabling (kemampuan) merupakan upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (encourage), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kota Tanjungbalai dan di Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai. Penelitian dilaksanakan dari bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan April 2018.

#### 3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian adalah proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan penelitian. Untuk itu diperlukan kesesuaian dengan kondisi dilapangan agar metode penelitian yang digunakan tepat dalam memperoleh pemahaman berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

Adapun tipe penelitian ini pada dasarnya adalah merupakan suatu studi evaluatif. Jenis studi evaluasi yang digunakan adalah evaluasi deskriptif yaitu menilai dan menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah ada dan menganalisanya untuk mendapatkan gambaran umum. Peneliti bukan saja memberikan gambaran fenomena-fenomena, tetapi juga mungkin membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (Gunawan Sumodinigrat, 2010).

### 3.3. Populasi dan Sampel

#### 3.3.1. Populasi

Sugyono (2005:55) mengatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kelurahan yang telah diberdayakan yang tergabung dalam kelompok UP2K dan masyarakat kelurahan binaan PTP2WKSS di wilayah kota Tanjungbalai serta seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai.

#### 3.3.2. Sampel

Sampel menurut Sugyono (2005:91) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto (2002:109) bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan ciri dan sifat yang dikehendaki oleh populasi.

Teknik sampling yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yang artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2005:96). Dasar penggunaan teknik ini adalah mengambil sampel yang dianggap memenuhi syarat untuk mewakili populasi sebagai obyek penelitian, untuk itu diambil beberapa sampel yang memiliki kompetensi atas bidang yang menjadi obyek penelitian.

Dalam hal ini penulis mengambil sampel yaitu Kepala Dinas/Kepala Bidang/Pejabat yang menangani program terkait pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai, Ketua TP.PKK Kota Tanjungbalai, Ketua kelompok UP2K, salah seorang warga binaan PTP2WKSS, perwakilan nelayan, perwakilan masyarakat, Camat dan Ketua TP.PKK Kecamatan Teluk Nibung.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap dan memadai, maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena sosial yang tampak pada obyek penelitian pada tempat dinama suatu kebijakan atau program pernah dilaksanakan.

#### 2. Wawancara.

Teknik wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditetapkan yaitu : Kepala Dinas/Kepala Bidang/Pejabat yang menangani program terkait pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai, Ketua TP.PKK Kota Tanjungbalai, Ketua kelompok UP2K/KUBP, ketua kelompok warga binaan PTP2WKSS, perwakilan nelayan, perwakilan masyarakat, Camat dan Lurah wilayah yang bersangkutan.

### 3. Dokumentasi.

Teknik mendapatkan data sekunder, diperoleh melalui penelusuran terhadap dokumen-dokumen, literatur-literatur dan laporan-laporan serta arsip-arsip pada kantor terkait yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat. Penelitian harus lebih mengandalkan dokumentasi daripada survei, karena data dokumentasi mengatasi kendala ruang dan waktu suatu penelitian (Riswandha Imawan, 2004).

#### 3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (2005:358), "Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca." Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002:103). Data yang diperoleh dari penelitian dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara melakukan analisa terhadap data tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif.

Analisis dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka analisis data berproses secara induktif dikarenakan beberapa alasan, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan – kenyataan ganda sebagaimana yang terdapat dalam data, analisis induktif lebih dapat membuat



hubungan peneliti – responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, analisis induktif dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan – keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar yang lain dan analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan – hubungan dan dapat memperhitungkan nilai – nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik (Moleong, 2002:5).

Data yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara langsung dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis, pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian.

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data merupakan data yang mentah. Data tersebut tidak akan berguna apabila tidak dianalisis untuk memberi arti atau makna pada data tersebut guna dalam memecahkan masalah penelitian

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sinetesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

## 3.2. Defenisi Konsep Dan Defenisi Operasional

### 3.2.1. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan.

Evaluasi merupakan proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator". Evaluasi program adalah langkah awal pengumpulan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian tindak lanjut yang tepat pula.

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program; "Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation)".

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan pada dasarnya memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar pengembangan diri.

### 3.5.1. Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam defenisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Defenisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian.

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi produktif adalah suatu strategi dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan keterampilan atau keahlian agar masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan memanfaatkan hal tersebut, serta adanya bantuan modal dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.
- b. Program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi produktif adalah program pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai dalam hal memberdayakan potensi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan.
- c. Kecamatan Teluk Nibung merupakan wilayah pesisir yang rata-rata penghasilan keluarga bersumber dari hasil tangkap ikan dan buruh nelayan yang masih sangat minim untuk menopang kehidupan sehar-hari. Untuk itu perlu diberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen / arsip tentang program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif dimulai dengan menghimpun masyarakat dengan penghasilan rendah/tidak tetap/ibu rumah tangga, lalu diberikan pelatihan. Setelah itu diberikan bantuan berupa alat atau perlengkapan pendukung sesuai pelatihan yang diberikan untuk mendukung proses produksi, dan akhirnya diberdayakan oleh pemerintah daerah sebagai penyedia hasil produksi unggulan daerah yang siap untuk dipamerkan dan dipasarkan.
2. Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan kelompok.
3. Setiap pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Tahap persiapan ini sangat penting karena dapat menentukan berhasil tidaknya program tersebut,

sehingga dapat dijadikan landasan berjalannya suatu program. Kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Kemudian dalam tahap pelaksanaan diadakan sosialisasi kewirausahaan terkait dengan program yang akan diberikan kepada masyarakat.

4. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan, tetapi belum semua yang dapat menjalankan usaha dengan serius.usaha. Bagi yang serius sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **5.2. Implikasi Kebijakan**

1. Membangun tempat pemasaran bagi para kelompok wirausaha, seperti membangun pusat oleh-oleh khas Kota Tanjungbalai.
2. Tetap memantau bagaimana keberlangsungan program dan menumbuhkan rasa percaya diri kepada masyarakat yang ingin berwirausaha.
3. Membuat aturan hukum khusus untuk program, agar menjamin secara hukum keberlangsungan program tersebut.

4. Mengembangkan keterampilan masyarakat dengan memberikan pelatihan yang memanfaatkan produk unggulan daerah lainnya.
5. Mensinkronkan program teknologi tepat guna (TTG) yang ada dalam program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai dengan menciptakan alat yang dapat mendukung peningkatan hasil produksi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Jabar Syafruddin Abdul. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, 2013, *Prosedur Suara Pendekatan Proktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Rineka. Cipta
- Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan masyarakat*. Bandung.  
PT. Retika Adhitama.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*.  
Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Hasibuan, SP. Melayu, 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*  
Jakarta: Buki Aksara
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.  
Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*.  
Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Suharto Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*.  
Bandung . ALFABETA
- Subarsono, Agus. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, Agus. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. ALFABETA
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. ALFABETA

Sujianto, 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama, Bandung.

Wahab, Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS ( Center of Academic Publishing Service)

